

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

Ayler Beniah Ndraha dan Dedy Pribadi Uang

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: aylerndraha@gmail.com

AbstrAct

West Halmahera Regency is a district in one of the Provinces in North Maluku. The strategy of empowering rural communities through the development of local economies in Halmahera Regency, North Maluku Province needs to be formulated because of the magnitude of the potential of this region. It is unfortunate that the attention of the government and the private sector has not touched the program because it is able to create new business fields that can bring local revenue West Halmahera Regency and income for independent and participant communities. The background of this problem is the basis of the authors to examine the strategy of empowering rural communities through local economic development in the western Halmahera district of North Maluku Province with a qualitative method of descriptive research method.

The results of the community empowerment strategy in developing the local economy state that there needs to be sectoral synchronization that consists of the government, the private sector and the community. Several factors that have not supported the community empowerment strategy in developing the local economy in West Halmahera Regency are communication factors, regional potential mapping, human resources, infrastructure, and monitoring and evaluation.

Keywords: *empowerment strategy, village, local economy.*

ABSTRAK

Kabupaten Halmahera Barat merupakan kabupaten di salah satu Provinsi di Maluku Utara. Strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Halmahera Provinsi Maluku Utara perlu dirumuskan oleh karena melihat besarnya potensi daripada daerah ini. Sangat disayangkan perhatian pemerintah dan juga swasta belum menyentuh program ini dikarenakan mampu menciptakan lahan-lahan usaha baru yang mampu mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Barat dan *income* bagi masyarakat yang mandiri dan partipatif.

Hasil dari strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi lokal menyatakan bahwa perlu adanya sinkronisasi sektoral yang terdiri pemerintah, swasta, dan masyarakat. Beberapa faktor yang belum mendukung strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi lokal di Kabupaten Halmahera Barat yaitu faktor komunikasi, pemetaan potensi daerah, sumber daya manusia, infrastruktur, dan monitoring dan evaluasi.

Kata kunci: pemberdayaan, desa, ekonomi lokal

PENDAHULUAN

Desa secara historis dan yuridis telah diakui keberadaannya, dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.¹ Hal ini menunjukkan bahwa memang desa adalah jati diri atau cikal bakal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus diakui dan dihormati.

Pemerintah baik ditingkat pusat dan lokal bersinergi untuk memajukan desa sebagai ujung tombak pelayanan dan pembangunan. Sejak tahun 2015, Pemerintah meluncurkan program satu desa satu miliar dengan jumlah anggaran sebesar 20,76 triliun rupiah. Tujuan dari kebijakan tersebut untuk mempercepat pembangunan desa. Bahkan di tahun 2018 akan dikucurkan dana sebesar 60 triliun ditambah skema pembangunan desa dengan program padat karya.² Dengan besarnya anggaran yang dikucurkan kepada setiap desa, maka diperlukan kemampuan sumber

daya manusia yang ada di desa untuk mengelola sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat dipergunakan untuk pembangunan desa. Salah satu strategi pembangunan desa adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat desa dengan cara mengembangkan potensi desa yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi desa tersebut. Potensi desa tersebut dapat berupa potensi wisata dan potensi ekonomi lainnya. Oleh karena itu diperlukan strategi pemberdayaan yang tepat sasaran guna mengembangkan potensi ekonomi lokal di setiap desa.

Pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan dan kemampuan³ Berdasarkan pengertian tersebut maka pemberdayaan adalah proses memberi dan menerima kekuatan dan kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan suatu tujuan. Menurut Prijono & Pranarka⁴ pemberdayaan mengandung dua arti. Arti yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*.⁵ Makna yang pertama pemberdayaan adalah pemberian kekuasaan atau kewenangan. Pemberdayaan dapat berjalan oleh karena adanya kekuasaan yang diberikan sehingga secara melekat orang atau kelompok yang menerima kekuasaan memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu. Makna yang kedua pemberdayaan adalah pemberian kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Dalam proses pemberdayaan ada proses pemberian

1 Dasar Pemikiran Penjelasan UUD Tahun 1945 Paragraf I.

2 Eduardo Simorangkir, “Pemerintah Kucurkan Dana Desa Sejak 2015, Apa Saja Hasilnya?”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3606172/pemerintah-kucurkan-dana-desa-sejak-2015-apa-saja-hasilnya> (diakses pada 18 Oktober 2018, pukul 10.45).

3 Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gaya Media, Yogyakarta.

4 Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (eds), 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS. Hlm. 77.

5 Dasar Pemikiran Penjelasan UUD Tahun 1945 Paragraf I.

kemampuan atau kesanggupan bagi seseorang atau suatu kelompok yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dari berbagai pengertian pemberdayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses pemberian kekuasaan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan kewenangan yang dimiliki. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan terhadap masyarakat desa, maka pemberdayaan masyarakat desa adalah proses memberikan kemampuan dan kesanggupan oleh pemerintah kepada masyarakat desa untuk melakukan kegiatan pembangunan dengan menggunakan potensi desa secara partisipatif.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa desa akan menjadi prioritas pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan dan pembangunan. Dalam hal ini juga Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat akan menyelaraskan program prioritas kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Halmahera Barat. Kabupaten Halmahera Barat dengan Luas Wilayah 33.969,42 km² yang terdiri dari 11.623,42 Km² wilayah laut dan 22.346 Km² wilayah darat, jumlah pulau-pulau kecil di Halmahera Barat sebanyak 123 pulau dengan rincian 2 pulau dihuni dan 121 pulau tanpa penghuni.⁶ Adapun jumlah desa se-kabupaten Halmahera Barat dengan persebaran di setiap kecamatan masing-masing yang dapat dilihat pada tabel 1.

6 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, "Letak Geografis Kabupaten Halmahera Barat", <https://www.halbakab.go.id/index.php/pages/get/1110> (diakses pada tanggal 19/10/2018, pukul 14 : 47)

Tabel 1

Luas Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat

Wilayah Kecamatan	2015	
	Kondisi Geografis	
	Jumlah Desa	Luas Wilayah
Jailolo	34	226
Jailolo Selatan	22	147.55
Sahu	6	281.35
Sahu Timur	19	122.86
Ibu	18	271
Ibu Selatan	17	109.82
Tabaru	16	368.33
Loloda	16	220.64

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2015.

Berdasarkan tabel di atas jumlah desa secara keseluruhan berjumlah 148 desa, dengan jumlah desa terbanyak ada di Kecamatan Jailolo yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Halmahera Barat. Di Kabupaten Halmahera Barat belum ada wilayah yang berstatus kelurahan, dengan demikian Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat akan lebih fokus menyelenggarakan pembangunan yang bermuara kepada desa. Penyelenggaraan pembangunan tingkat desa membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan suatu strategi pemberdayaan masyarakat desa untuk mendorong setiap masyarakat berperan aktif dalam pembangunan desa terlebih khusus dengan pengembangan ekonomi lokal yang ada di desa masing-masing. Pemerintah daerah harus mampu memetakan setiap potensi ekonomi yang ada di setiap desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat harus fokus mengembangkan potensi ekonomi lokal yang ada di desa.

Beberapa sektor unggulan yang ada di Kabupaten Halmahera Barat antara lain sektor perikanan, pariwisata dan sektor pertanian. Dari sektor pertanian sebagai contoh dari potensi holtikultura berdasarkan dari sumber BPS Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2014, bahwa jumlah produksi buah-buahan yang paling banyak adalah buah pisang dengan jumlah 72.122 buah dengan produksi terbesar berlokasi di Kecamatan Sahu Timur. Hal ini akan menjadi peluang besar bagi pengembangan ekonomi lokal di desa untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi yang pada akhirnya akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal di desa. Bilamana dilihat dari sektor unggulan perikanan, kita dapat melihat pertumbuhan sektor perikanan Kabupaten Halmahera Barat dengan melihat jumlah rumah tangga perikanan tangkah sebagai salah satu indikator pertumbuhan sektor perikanan. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut⁷:

Tabel 2
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Halmahera Barat

Kecamatan & Kabupaten	Rumah Tangga Perikanan Tangkap (Rumah Tangga)		
	Perikanan Laut	Perikanan Umum	Jumlah
	2014	2014	2014
Jailolo	312	0	312
Jailolo Selatan	150	0	150
Sahu	160	0	160

7 BPS Kabupaten Halmahera Barat, "Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Halmahera Barat, 2014, <https://halbarkab.bps.go.id/dynamictable/2016/03/12/52/jumlah-rumah-tangga-perikanan-tangkap-menurut-kecamatan-dan-subsektor-di-kabupaten-halmahera-barat-2014.html> (diakses pada tanggal 21/10/2018, Pukul 12 : 35)

Sahu Timur	0	0	0
Ibu	200	0	200
Ibu Selatan	120	0	120
Tabaru	0	0	0
Loloda	322	0	322
Halmahera Barat	1.264	0	1.264

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga perikanan tangkap secara keseluruhan berada pada sektor perikanan laut mengingatkan luas wilayah laut kita sangat luas berpotensi akan terus mengalami peningkatan jumlah rumah tangga perikanan tangkap di Kabupaten Halmahera Barat. Dari tabel tersebut jumlah rumah tangga perikanan terbanyak di Kecamatan Loloda, hal ini dipengaruhi oleh luas wilayah yang memang banyak dikelilingi oleh pulau-pulau kecil. Dengan demikian potensi perikanan ke depan akan menjadi salah satu sektor unggulan untuk pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Halmahera Barat. Sektor unggulan ketiga yaitu pariwisata memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi potensi ekonomi lokal yang tentunya dapat dikembangkan di desa. Potensi wisata Kabupaten Halmahera Barat terdiri atas wisata alam, wisata perairan, dan wisata budaya. Persebaran ketiga potensi wisata tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini⁸:

8 Website resmi Kabupaten Halmahera Barat, "Potensi Wisata", <https://www.halbarkab.go.id/index.php/pages/get/2100>, (diakses pada tanggal 21/10/2018, pukul 14:02).

Tabel 3
Gambaran Konsep Pembagian Wilayah dan Kawasan Wisata di Halmahera Barat

No	Kecamatan	Ecotourism		culturtourism
		coastol & Marine Tourism	Terrestrial Tourism	
1.	Kecamatan Sahu	Pantai Akelamo	-	Monumen VOC
2.	Kecamatan Sahu Timur	-	Telaga Ranu, Air Terjun	Rumah adat, upacara adat, tari-tarian
3.	Kecamatan Ibu	Pantai	Telaga, Pemandian air panas, agrowisata	-
4.	Kecamatan Ibu Utara	-	Agrowisata, Telaga	-
5.	Kecamatan Selatan	Pantai, pemandangan laut	Gunung, agrowisata	-
6.	Kecamatan Jailolo	Pantai Tataleka, Pantai Marimbati	Gunung Jailolo, air panas	Desa Idamdehe
7.	Kecamatan Jailolo Selatan	-	-	Wisata sejarah, makam pahlawan, cagar alam
8.	Kecamatan Jailolo Timur	Panorama pantai, pantai Toniku	-	-
9.	Kecamatan Loloda	Teluk Kedi	-	-

Sumber: Website Resmi Kabupaten Halmahera Barat, Tahun 2017.

Pada tabel di atas adalah merupakan gambaran dari pembagian potensi wisata berdasarkan wilayah di Kabupaten Halmahera Barat. Dari 9 (sembilan) kecamatan seluruhnya memiliki potensi wisata yang berpeluang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Halmahera Barat. Oleh karena itu, dari ketiga sektor unggulan tersebut harus dikembangkan dengan strategi pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat desa yang ada di Kabupaten Halmahera Barat.

Isu utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Halmahera Barat. Tantangan bagi pemerintah daerah untuk

meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa karena diperhadapkan dengan menurunnya nilai gotong royong di antara masyarakat desa yang akan berpengaruh terhadap angka partisipasi masyarakat desa yang ada di Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini bisa saja disebabkan oleh lemahnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat melalui pemerintah desa. Selain itu, faktor sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Infrastruktur pendidikan yang belum memadai mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Kabupaten Halmahera Barat terutama infrastruktur teknis seperti balai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam mengembangkan ekonomi lokal yang ada di desa.

Kerangka Konseptual Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan merupakan proses perubahan fungsi dari peran sebagai objek berubah menjadi subjek⁹. Dalam proses pemberdayaan masyarakat pemerintah akan melakukan upaya dan tindakan untuk menjadikan masyarakat bukan sebagai objek suatu kebijakan tetapi sebagai pelaku kebijakan. Untuk menjadikan peran masyarakat sebagai pelaku diperlukan partisipasi yang kuat dari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam setiap kebijakan pemerintah. Dengan demikian tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat maka program dan kegiatan pemerintah tidak akan berjalan efektif dan tepat sasaran. Dalam proses menjadikan masyarakat sebagai subjek perlu diperhatikan ada tiga komponen dasar dalam proses pemberdayaan yaitu pertama adalah sumber daya manusianya (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat); kedua adalah lingkungan pendukung berupa baik fisik maupun non fisik; dan ketiga adalah aspek manajerial untuk memastikan proses pemberdayaan berjalan sesuai prinsip manajemen dalam pencapaian tujuan. Melengkapi pengertian tersebut, proses pemberdayaan dapat melewati beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut¹⁰:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

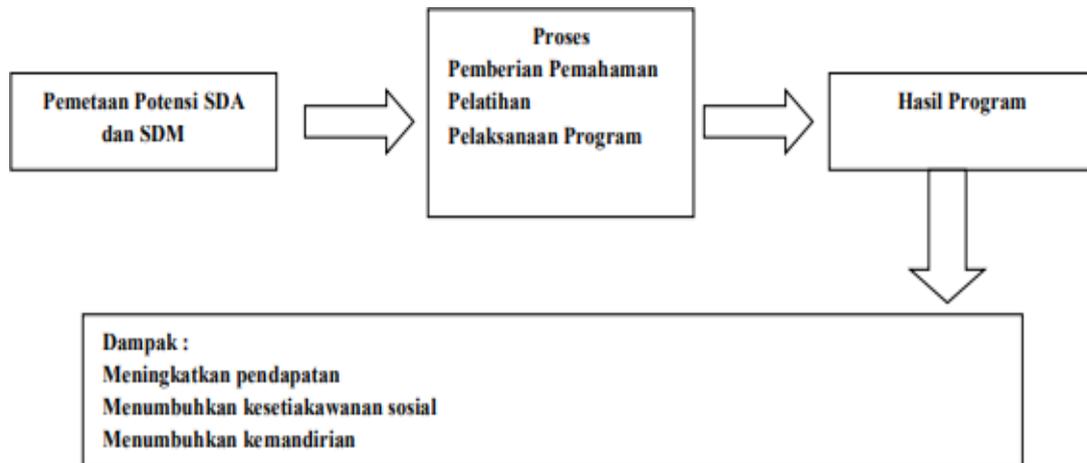
Pada tahapan pertama, pemerintah membangun komunikasi yang partisipatif sehingga masyarakat dapat mengerti dengan jelas yang pada akhirnya menimbulkan kesadaran untuk mau terlibat dalam proses pemberdayaan. Pada tahapan kedua, masyarakat dengan sadar membuka diri untuk menerima *transfer of knowledge* dan *transfer of authority* untuk membangun kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pada Tahapan ketiga adalah merupakan tahap akhir dari proses pemberdayaan dan merupakan tujuan dilakukannya pemberdayaan. Pada akhirnya bentuk dan model pemberdayaan apapun harus mampu meningkatkan partisipasi dan inovasi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang dibingkai dalam program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam skema program pemberdayaan masyarakat yang dapat dilihat pada gambar 1.

Pada skema yang pertama, yang harus dilakukan adalah memetakan potensi-potensi apa saja yang ada dalam masyarakat dan lingkungannya. Potensi tersebut dapat berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dalam memetakan potensi, pemerintah harus turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi kekuatan dan peluang yang dapat dijadikan potensi untuk dikembangkan.

9 Suparjan & Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Aditya Media: Yogyakarta. Hlm 44.

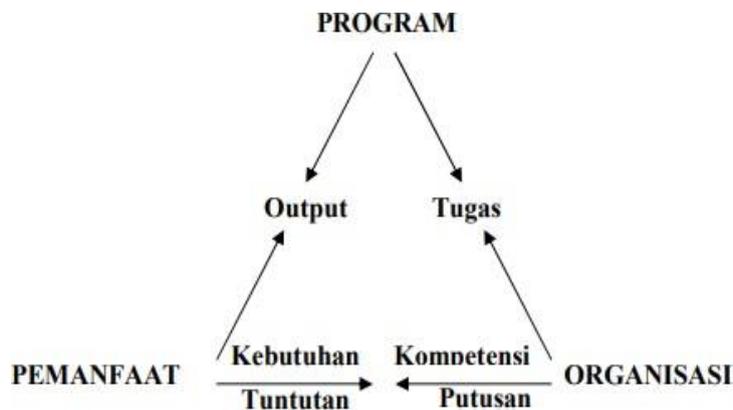
10 Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Graha Ilmu : Yogyakarta. Hlm 83.



Gambar 1
Skema Program Pemberdayaan Masyarakat ¹¹

Sumber: Data hasil penelitian

Pada skema yang kedua, yang harus dilakukan adalah pemerintah melakukan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pemerintah mengimplementasikan program yang sudah disiapkan. Setelah program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan, maka perlu mengetahui hasil dari pelaksanaan program dan feedback dari lingkungan dimana proses pemberdayaan dikerjakan. Berkaitan dengan pelaksanaan suatu program, David Korten¹² merumuskan model implementasi program atau yang dikenal dengan model kesesuaian. Model implementasi program dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2
Model Implementasi Program

Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12)

11 Yusuf Adam Hilman dan Elok Putri Nimasari. 2018. *Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas*, file:///C:/Users/STPDN/Downloads/Model_Program_Pemberdayaan_Masyarakat_Desa_Berbasi.pdf (diakses pada tanggal 21/10/2018, pukul 20 : 12).

12 Akib, Header dan Tarigan. Antonius. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal, 2000. Hlm 12.

Berdasarkan model korten dalam implementasi program terdapat tiga unsur yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan sasaran program. Pemerintah perlu memastikan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan sasaran program.

Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal adalah proses kerja sama antara pemerintah dan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan¹³. Tujuan pengembangan ekonomi lokal adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu sinergitas antara Pemerintah dan masyarakat serta sektor non pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan inovasi penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Memperkuat pendapat Blakely & Bradshaw di atas, maka menurut World Bank pengembangan ekonomi lokal adalah proses dimana para pelaku pembangunan, bekerja kolektif dengan mitra dari sektor publik, swasta dan non pemerintah, untuk menciptakan kondisi lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja¹⁴. Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekonomi lokal adalah proses atau kegiatan yang melibatkan ketiga lembaga sosial yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat untuk bekerja sama menemukan dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada di tingkat lokal dengan tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

¹³ Blakely and Bradshaw. 2002. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*, 3rd Ed. SAGE Publication. California-USA.

¹⁴ Nurzaman, S.S. 2002. *Perencanaan Wilayah di Indonesia Pada Masa Sekitar Krisis*. ITB, Bandung.

Sasaran dari pengembangan ekonomi lokal adalah potensi daerah. Potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang berpotensi menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat daerah dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan¹⁵. Dari berbagai potensi ekonomi yang dimiliki terdapat potensi unggulan yang oleh pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai visi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kemajuan suatu daerah. Dalam pengembangan potensi ekonomi daerah, maka diperlukan koordinasi dan sinkronisasi sektoral. Berikut ini adalah skema atau alur sinkronisasi sektoral dalam pengembangan ekonomi lokal:

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa semua sektor baik organisasi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat berperan penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Siklus pertama diawali dari penciptaan iklim investasi daerah yang dipelopori oleh pemerintah dengan mengeluarkan regulasi sebagai dasar pengembangan ekonomi lokal dan pengaturan peran dan partisipasi dari lembaga sektor lainnya. Proses selanjutnya pemerintah akan membuka ruang kerja sama dengan swasta atau lembaga kemasyarakatan lainnya untuk menanamkan modal atau investasi yang dikoordinir oleh instansi terkait, salah satunya adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). Kemudian pemerintah bersama organisasi non pemerintah menyediakan sarana dan prasarana penunjang program dan kegiatan pengembangan ekonomi lokal.

¹⁵ Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta.



Gambar 3

Sinkronisasi Sektoral Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal¹⁶

Untuk mendukung penuh pengembangan ekonomi lokal, maka sumber daya manusianya perlu disiapkan dengan mengadakan pelatihan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan teknis. Selama proses pengembangan ekonomi lokal perlu dilakukan pendampingan oleh konsultan atau LSM yang kompeten sesuai keahlian di bidangnya.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Halmahera Barat

Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa gairah dan semangat yang baru bagi desa di Indonesia. Semangat ini harus terus dijaga di pemerintahan desa dan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pemahaman pada undang-undang tentang desa ini perlu segera disosialisasikan kepada seluruh masyarakat di desa agar masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam memajukan desanya sendiri.

Berbicara tentang semangat memajukan desa, perlu dipahami bahwa peran serta baik dari pemerintah, swasta, dan juga masyarakat sangat diperlukan. Memajukan desa salah satunya adalah dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pergeseran paradigma lama dari status masyarakat sebagai objek kebijakan menjadi subyek kebijakan pada paradigma baru. Paradigma baru ini memberikan dorongan kepada pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam kebijakan pemerintah. Keterlibatan masyarakat ditinjau dari tingkat partisipasi masyarakat sangat menentukan arah dan tujuan kebijakan yang nantinya dievaluasi apakah efektif dan tepat sasaran.

Kabupaten Halmahera Barat memiliki 148 desa dan desa-desa tersebut sangat

¹⁶ Solihin, Dadang. 2008. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI)*. Bappenas.

kaya akan kekayaan alam dan tentunya ini merupakan modal dasar sebagai potensi dalam memberdayakan masyarakat desa ditinjau dari pengembangan ekonomi berbasis cita rasa daerah atau local. Memberdayakan masyarakat desa dengan kemandirian serta berbasis local maka akan meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Diharapkan nantinya pemerintah hanya menjadi penggerak, pendorong, dan mengawasi kegiatan masyarakat yang berlangsung, hal ini merupakan inti dari masyarakat sebagai subyek kebijakan pemerintah.

Potensi-potensi yang dimiliki oleh desa-desa di Kabupaten Halmahera Barat adalah dari sector perikanan, pariwisata, dan pertanian. Solihin memberikan suatu strategi agar pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan ekonomi local berlangsung baik yaitu adanya sinkronisasi sektoral antara berbagai pihak yaitu pemerintah, swasta, dan peran serta masyarakat. Berdasarkan penelitian di lapangan bahwa beberapa aspek yang menjadikan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal masih belum berjalan dengan baik di Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:

Pertama, aspek pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pemberdayaan di desa. Di Kabupaten Halmahera Barat keterlibatan masyarakat dalam menyusun program pemberdayaan masih dikatakan sangat minim. Penyusunan program sudah seharusnya melibatkan masyarakat agar pemerintah sebagai penyusun kebijakan mampu mengetahui program-program apa yang diperlukan oleh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan. Selama ini

penyusunan kebijakan oleh pemerintah masih menerapkan model pengambilan kebijakan *top-down*, padahal seharusnya pemerintah perlu mendengarkan aspirasi masyarakat terkait pemberdayaan di desa. Selain itu dengan adanya regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi local mampu menciptakan iklim lingkungan usaha yang kondusif sehingga akan menarik para swasta untuk menanamkan modal di dalam dunia usaha tersebut.

Kedua, aspek swasta. Peran sera swasta dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi local di Kabupaten Halmahera Barat sangat vital. Pemerintah perlu kerjasama dengan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana, hal ini sangat penting karena pemerintah masih kurang dalam hal dana maupun anggaran dan disinilah swasta berperan karena swasta memiliki permodalan.

Ketiga, aspek masyarakat. Aspek masyarakat merupakan aspek yang sangat vital dalam pemberdayaan untuk mengembangkan ekonomi lokal di Kabupaten Halmahera Barat. Masyarakat merupakan tujuan akhir dari program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga bekerjasama dengan masyarakat sehingga ekonomi local dapat berkembang. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat masih terhitung minim tapi hal ini dapat diperbaiki dengan strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menggerakkan dan mendorong masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi local di Kabupaten Halmahera Barat.

Yusuf Adam Hilman dan Elok Putri Nimasari dalam model program pemberdayaan masyarakat memaparkan bahwa perlu dilakukan pemetaan baik dari sumber daya manusia dan sumber daya alam serta memberikan pemahaman dan pelatihan kepada masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut. Melihat dari beberapa fakta yang terjadi di lapangan dan berkaca dari teori model program pemberdayaan masyarakat dari Yusuf Adam Hilman dan Elok Putri Nimasari, maka perlu diterapkan strategi untuk mampu memberdayakan masyarakat desa dalam mengembangkan ekonomi lokal di Kabupaten Halmahera Barat sebagai berikut:

1. **Komunikasi.** Pemerintah sebagai penggerak dan pendorong utama pemberdayaan masyarakat desa perlu menerapkan system pengambilan kebijakan *bottom-up*. Program-program yang akan diambil oleh pemerintah perlu mendengar aspirasi dari masyarakat dengan melalui rapat, diskusi maupun musyawarah secara berkala. Faktor komunikasi ini sangat perlu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.
2. **Pemetaan potensi daerah.** Pemerintah perlu menerapkan pemetaan terhadap sumber daya alam di setiap desa sehingga akan menerapkan program pemberdayaan yang sesuai dengan masing-masing karakteristik potensi desa tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa untuk setiap desa dapat terjadi juga perbedaan program-program yang dilakukan oleh pemerintah yang disebabkan

karena perbedaan jenis potensi alam yang akan dikembangkan sebagai pengembangan ekonomi lokal desa.

3. **Sumber daya manusia (SDM).** Pemerintah memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat terkait dengan program pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi lokal di Kabupaten Halmahera Barat. Dalam hal ini pemerintah mempersiapkan para masyarakat untuk nantinya dapat mengerti dan melaksanakan program pemberdayaan tersebut sebagai bentuk dukungan aktif. Pemahaman kepada masyarakat terkait program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi local mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di daerahnya.
4. **Infrastruktur.** Mengundang pihak swasta yang mempunyai modal untuk membangun suatu lingkungan usaha yang kondusif dan bergairah. Keikutsertaan pihak swasta dalam program pemberdayaan masyarakat desa dalam pengembangan ekonomi local mampu menciptakan ekonomi masyarakat bertumbuh dengan dibangunnya infrastruktur di desa, contohnya infrastruktur teknis adalah pembangunan pasar atau balai pelatihan untuk masyarakat sebagai bentuk CSR swasta.
5. **Monitoring dan evaluasi.** Pemerintah secara berkala menjamin keamanan dan mengawasi serta mengevaluasi setiap program pemberdayaan masyarakat tersebut

dan tidak menutup kemungkinan selalu menerima *feedback* dan respon dari masyarakat.

SIMPULAN

Strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi local di Kabupaten Halmahera Barat perlu dilakukan dengan melihat besarnya potensi dasar daripada daerah ini. Sangat disayangkan perhatian pemerintah dan juga swasta belum menyentuh program ini dikarenakan mampu menciptakan lahan-lahan usaha baru yang mampu mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Barat dan *income* bagi masyarakat yang mandiri dan partipatif.

Hasil dari strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi lokal menyatakan bahwa perlu adanya sinkroniasi sektoral yang terdiri pemerintah sebagai pencipta regulasi, memberikan keamanan dan kondusivitas dalam dunia usaha yang menarik swasta untuk menanamkan modal serta investasi untuk pembangunan infrastruktur dan masyarakat sebagai subyek kebijakan mampu berpartisipasi aktif dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi lokal di Kabupaten Halmahera Barat.

Beberapa faktor yang belum mendukung strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi lokal di Kabupaten Halmahera Barat yaitu faktor komunikasi, pemetaan potensi daerah, sumber daya manusia, infrastruktur, dan monitoring dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Akib, Header dan Tarigan. Antonius. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal, 2000.
- Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Blakely and Bradshaw. 2002. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*, 3rd Ed. SAGE Publication. California-USA.
- Nurzaman, S.S. 2002. *Perencanaan Wilayah di Indonesia Pada Masa Sekitar Krisis*. ITB, Bandung.
- Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (eds), 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Solihin, Dadang. 2008. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI)*. Bappenas.
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gaya Media, Yogyakarta.
- Suparjan & Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Aditya Media: Yogyakarta.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta.

Website

- BPS Kabupaten Halmahera Barat, "Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Halmahera Barat, 2014, [148](https://halbarkab.bps.go.id/dynamictable/2016/03/12/52/jumlah-</p></div><div data-bbox=)

rumah-tangga-perikanan-tangkap-menurut-kecamatan-dan-subsektor-di-kabupaten-halmahera-barat-2014.html (diakses pada tanggal 21/10/2018, Pukul 12 : 35).

Eduardo Simorangkir, "Pemerintah Kucurkan Dana Desa Sejak 2015, Apa Saja Hasilnya?", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3606172/pemerintah-kucurkan-dana-desa-sejak-2015-apa-saja-hasilnya> (diakses pada 18 Oktober 2018, pukul 10.45).

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, "Letak Geografis Kabupaten Halmahera Barat", <https://www.halbarkab.go.id/index.php/pages/get/1110> (diakses pada tanggal 19/10/2018, pukul 14 : 47

Website resmi Kabupaten Halmahera Barat, "Potensi Wisata", <https://www.halbarkab.go.id/index.php/pages/get/1110>

[halbarkab.go.id/index.php/pages/get/2100](https://www.halbarkab.go.id/index.php/pages/get/2100), (diakses pada tanggal 21/10/2018, pukul 14:02).

Yusuf Adam Hilman dan Elok Putri Nimasari. 2018. *Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas*, file:///C:/Users/STPDN/Downloads/Model_Program_Pemberdayaan_Masyarakat_Desa_Berbasis_Komunitas.pdf (diakses pada tanggal 21/10/2018, pukul 20 : 12).

Peraturan Perundang-Undangan

UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU 6 tahun 2014 tentang Desa